

# **KEGAGALAN BANTUAN LUAR NEGERI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS *FOOD AID* DI KOREA UTARA**

**Dini Septyana Rahayu**

**Universitas Darussalam Gontor**

1

## **Abstract**

*This research is the answer of why foreign aid failed to solve human rights violations in North Korea. The writer focuses on North Korea which applies isolationist policy and the government domination toward foreign aids. Furthermore, this research classifies human right violations in terms of famine and malnutrition happen in North Korea. Moreover, the method of this research is a qualitative method that the data is gathered from literature studies- books, journal, documents which are taken from the web-site to strengthen the writer's argument. The result of this research shows that the isolationist policy and the government domination affect the distribution of foreign aid. The isolationist policy in North Korea is based on juche ideology which values self reliance and limits the foreign parties to estimate the necessity of the victims and supervise the distributions of the goods. That ideology is also the reason which causes North Korea is resistant toward foreign aid for human right. Meanwhile, the failure is also caused by government which is very dominant in the distribution process of foods and also helps from the outsiders. The domination is centered in Public Distribution System (PDS) and food allocation is managed with discriminative ratio. Foreign aids is allocated for the sake of government economy system and even proven used for military interests, not for famine.*

**Keywords:** *foreign aid; human rights; isolationist; juche; North Korea*

## **Abstrak**

*Penelitian ini menjawab pertanyaan mengapa bantuan luar negeri gagal menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Peneliti fokus pada kondisi politik Korea Utara yang isolasionis dan sikap pemerintah yang dominan, sebagai penyebab kegagalan bantuan luar negeri menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, dalam penelitian ini yang tergolong*

## Kegagalan Bantuan Luar Negeri dalam.... (Dini Septyana R)

*sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia adalah kelaparan dan malnutrisi yang terjadi di Korea Utara. Lebih jauh, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yakni termasuk buku – buku, jurnal, dan juga dokumen – dokumen yang diperoleh dari laman web yang sifatnya dapat digunakan untuk penelitian dan mendukung penjelasan argumen. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan luar negeri gagal menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berupa kelaparan dan malnutrisi di Korea Utara, karena pemerintah Korea Utara sangat isolasionis dan dominan terhadap aktivitas pemberian dan distribusi bantuan luar negeri. Sikap isolasionis Korea Utara yang juga didasari oleh ideologi juche yang mengajarkan nilai – nilai self – reliance membatasi gerak pihak donor dalam melakukan aktivitas bantuan luar negeri, seperti proses penaksiran kebutuhan bantuan sampai pada pengawasan distribusi bantuan. Ideologi tersebut pula yang menyebabkan Korea Utara resisten terhadap nilai – nilai hak asasi manusia dalam bantuan luar negeri. Sementara itu, kegagalan juga disebabkan oleh dominasi pemerintah terhadap distribusi sumber – sumber pangan termasuk bantuan luar negeri. Dominasi ini berupa distribusi yang dipusatkan pada lembaga pemerintah seperti PDS (Public Distribution System) dan alokasi sumber pangan berdasar rasio yang diskriminatif. Bantuan luar negeri juga terbukti dialokasikan untuk kepentingan ekonomi pemerintah lain bahkan untuk kepentingan militer, bukan untuk mengatasi kelaparan.*

**Kata Kunci:** *Korea Utara; bantuan luar negeri; hak asasi manusia,; juche; isolasionisme*

### **Pendahuluan**

Tulisan ini menjelaskan tentang kegagalan bantuan luar negeri dalam mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis kegagalan bantuan luar negeri dalam mengurangi masalah pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara berupa kelaparan. Bantuan luar negeri yang diberikan untuk Korea Utara dalam rangka mengurangi pelanggaran hak asasi manusia yang juga merupakan masalah pembangunan di Korea Utara mengalami kegagalan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal yang muncul dari Korea Utara sendiri.

Salah satu penyebab kegagalannya adalah kondisi politik internal Korea Utara yang terkenal isolasionis, sekaligus juga disebabkan oleh dominasi pemerintah Korea Utara atas bantuan luar negeri yang diberikan. Isolasionisme tersebut, disebabkan oleh ideologi turun temurun yang dianut oleh Korea Utara, yakni ideologi *juche*. Kegagalan ini semakin memperparah kondisi warga negara Korea Utara dan mengarah ke dalam sebuah bentuk *human rights violations* atau pelanggaran hak asasi manusia, sebab terbatasnya atau bahkan tidak adanya akses warga Korea Utara untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan pembangunan. Hal ini termasuk akses dalam pangan, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan hak dasar sekaligus hak asasi setiap warga negara yang semestinya harus dipenuhi oleh pemerintahnya.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki argumen bahwa bantuan luar negeri yang gagal menyelesaikan masalah pembangunan terkait ketersediaan pangan di Korea Utara, mengarah pada sebuah pelanggaran hak asasi manusia yakni kelaparan. Bantuan luar negeri tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan di suatu negara, namun juga berkaitan dengan aspek yang lain seperti hak asasi manusia. Hal ini mengingatkan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses menciptakan kebebasan bagi rakyat untuk memenuhi hak-haknya. Bagi negara yang berstatus sebagai negara miskin atau negara yang rentan (*fragile states*)<sup>1</sup> seperti Korea Utara, proses pembangunan sangat membutuhkan bantuan luar negeri untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pembangunan (McLouglin, 2009). Dalam proses tersebut unsur hak asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan, sebab hak untuk menikmati pembangunan dan bebas dalam memenuhi haknya juga merupakan inti dari sebuah

---

<sup>1</sup> Menurut OECD DAC pada tahun 2007, negara dikatakan rentan (*fragile*) ketika struktur negara tidak memiliki *political will* dan tidak memiliki kapasitas dalam memberikan fungsi dasar yang dibutuhkan dalam mengurangi kemiskinan, pembangunan dan menjaga keamanan dan hak asasi manusia dari populasi yang mereka miliki. Penjelasan tersebut secara tidak langsung membuat penjelasan tentang negara yang rentan atau *fragile states* adalah negara yang gagal menunjukkan beberapa fungsi tertentu dalam mengakomodir kebutuhan dasar rakyat sekaligus memenuhi ekspektasi rakyat terhadap negara.

pembangunan itu sendiri (Sen, 1999)<sup>2</sup>. Negara yang rentan (*fragile states*) apalagi yang memiliki sistem otokrasi seperti Korea Utara, sangat sering berhadapan dengan masalah hak asasi manusia. Masalah kelaparan misalkan, merupakan masalah pembangunan yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

Sikap negara yang isolasionis menyebabkan negara – negara donor termasuk pihak penyalur bantuan luar negeri yang diberikan untuk menangani masalah di Korea Utara mengalami kesulitan dalam menentukan strategi dan sasaran dalam pemberian bantuan, sekaligus kesulitan dalam mengawasi distribusi bantuan yang diberikan (Sen, 1999). Dalam mengelola bantuan luar negeri, negara resipien perlu memiliki kebijakan yang jelas dan terarah terkait alokasi dana bantuan maupun distribusi bantuan makanan (*food aid*) yang disalurkan oleh pihak donor, sehingga bantuan yang diberikan akan berdampak signifikan terhadap permasalahan yang ada. Untuk kasus Korea Utara, alokasi bantuan sangat didominasi oleh pemerintah dan distribusi bantuan tersebut juga tidak mencakup seluruh lapisan yang membutuhkan.

Rezim yang diktator dan totalitarian membuat bantuan yang masuk terbatas, selain alokasi dari bantuan tersebut kebanyakan tidak untuk penanggulangan krisis ekonomi dan pangan yang berkelanjutan, melainkan untuk peningkatan aspek yang bersangkutan dengan rezim Kim, termasuk militer dan pengembangan nuklir (JiYoung, 2014). Padahal seharusnya, bantuan luar negeri mampu menutupi kekurangan pemerintah dalam hal keterbatasan dana penyelenggaraan pembangunan. Untuk negara yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas besar

---

<sup>2</sup> Dalam tulisannya, Amartya Sen menyebutkan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses memperluas kebebasan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebebasan ini mencakup kebebasan yang dapat dirasakan masyarakat dalam mengakses kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, maupun fasilitas publik lainnya. Amartya Sen dalam bukunya menjadikan kebebasan sebagai penilaian dalam melihat sebuah pembangunan. Penilaian terhadap perkembangan proses pembangunan dilihat dari apakah kebebasan masyarakat meningkat atau tidak, dengan kata lain Amartya Sen menjadikan uncur kebebasan sebagai bentuk evaluasi pada pembangunan. Hal ini dilihat penulis sebagaimana yang akan dijelaskan dalam penelitian ini sebagai manifestasi ;ain dari sebuah hak asasi manusia yakni kebebasan mengakses ekonomi, kesehatan, dan lainnya yang tersebut sebelumnya.

untuk menjalankan agenda pembangunan nasional, bantuan luar negeri menjadi satu – satunya jalan untuk memperoleh dukungan pembangunan dan negara – negara dengan kapasitas yang lebih merupakan sumber dari bantuan itu sendiri.

### **Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini kan menjawab pertanyaan tentang keterkaitan antara kegagalan bantuan luar negeri dengan pembangunan, dilihat dari aspek hak asasi manusia yakni, " Mengapa bantuan luar negeri gagal menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara? ".

### **Kerangka Pemikiran**

Bantuan luar negeri atau *foreign aid* merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi untuk negara yang masih memiliki status sebagai negara berkembang (*developing countries*) atau bahkan negara miskin (*underdeveloped countries*). Untuk negara berkembang, setidaknya bantuan luar negeri berfungsi untuk ikut membantu dalam proses implementasi suatu kebijakan atau dalam proses perancangan kebijakan, termasuk juga membantu pelaksanaan dari sebuah proyek tertentu di negara berkembang (Owarinde and Onakoya, 2016). Dalam konteks negara berkembang, bantuan luar negeri akan berperan cukup besar dalam pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, termasuk juga memperkecil kesenjangan yang ada antara dana cadangan pemerintah dengan investasi (Owarinde and Onakoya, 2016). Sehingga, itulah sebabnya mengapa dikatakan bantuan luar negeri memiliki andil cukup besar dalam menentukan arah pembangunan dan juga menentukan kesuksesan dari sebuah pembangunan itu sendiri.

Selain bantuan luar negeri, bantuan pangan (*food aid*) juga merupakan salah satu instrument dari sebuah bantuan luar negeri dan seringkali dikritisi terkait efektivitasnya sebagai salah satu bagian dari sumber pembangunan. Menurut Easterly dan Pfitze (2008), *food aid* merupakan salah satu dari tiga cara menyalurkan bantuan luar negeri berdasarkan kepentingan khusus (Williamson, 2009). Bantuan

dalam bentuk makanan (*food aid*) dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Williamson, 2009). Pertama, bantuan makanan (*food aid*) yang ada dapat dikonsumsi pada saat tertentu atau diakumulasikan untuk dimonetisasi dan memberikan keuntungan serta menjadi sumber yang penting bagi pendapatan masyarakat. Selain itu, karena mayoritas dari komoditas pangan yang diperbantukan adalah komoditas internasional, maka hal ini dapat mengurangi pengeluaran untuk pembayaran luar negeri (*foreign exchange*) untuk produk impor, dan menciptakan *balance – of payments*. Pengaruh ketiga *food aid* pada pembangunan (*development*) adalah tidak lain yakni menambah ketersediaan bahan pangan di wilayah domestik negara resipien.

Bantuan luar negeri, sangat berperan penting dalam sebuah proses pembangunan bagi negara yang rentan atau bahkan negara gagal. Pembangunan atau *development* dalam arti yang umum kerap diartikan sebagai sebuah kemajuan yang terjadi di sebuah sistem baik secara keseluruhan ataupun hanya pada beberapa elemen tertentu. Dalam bukunya, *Development as Freedom*, Amartya Sen menjelaskan bahwa ada keterkaitan yang erat antara kebebasan (*freedom*) dengan pembangunan suatu negara (*development*). Menurutnya, pembangunan dilihat sebagai proses memperluas kebebasan yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Sen, 1999). Sehingga bentuk penekanan dan dominasi terhadap hak atas kebebasan tersebut, bukan merupakan sebuah bentuk dari sebuah pembangunan.

Hal – hal yang sifatnya tidak mendukung pembangunan, dalam artian seperti apa yang dijelaskan Amartya Sen seperti mengekang kebebasan, dominasi atas hak – hak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Secara umum, hak asasi manusia dipahami sebagai hak – hak yang melekat dengan diri manusia. Konsep ini mengakui bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hak asasinya tanpa perbedaan status baik ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Selain itu, hak asasi manusia juga dijamin oleh hukum yang berkenaan dengan hak asasi, yang melindungi individu atau kelompok dari tindakan – tindakan yang bertentangan

dengan kebebasan dasar dan apa yang disebut dengan martabat manusia (OHCR, 2017).

Isu mengenai hak asasi manusia akan pangan (*human rights to food*) muncul dalam pertemuan khusus *Human Rights Council* di Jenewa, 22 Mei 2008. Dalam salah satu sesi, *The Human Rights Council* dari PBB mengajak dan menyerukan pada negara – negara dan organisasi – organisasi terkait untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia (*human rights*) dalam segala aktivitas terkait pengurangan dan pencegahan kelaparan. Dalam pertemuan tersebut, seluruh negara anggota dan organisasi – organisasi yang relevan terhadap permasalahan krisis pangan untuk ikut berpartisipasi dalam merealisasikan hak untuk pangan sebagai tujuan dari hak asasi manusia.

Penjelasan tentang hak asasi manusia diatas, merupakan sebuah bentuk dari konsep hak asasi manusia yang diyakini oleh seluruh manusia dan pemerintahan suatu negara di seluruh dunia. Konsep hak asasi manusia, dengan kata lain merupakan sesuatu yang universal. Sebagaimana penjelasan Jack Donnely dalam tulisannya tentang universalitas yang relative dari konsep hak asasi manusia. Donnely menjelaskan bahwa hak asasi manusia menjadi universal, sebab hak asasi yang sifatnya alamiah dan lahiriah melekat pada diri manusia, secara universal dipegang oleh setiap manusia (Donnely, 2007). Hal tersebut yang kemudian mendasari munculnya perjanjian – perjanjian terkait hak asasi manusia, yang mengatur hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam berbangsa dan bernegara.

Namun, universalitas dari hak asasi manusia pada satu sisi dapat saling berbenturan dengan nilai budaya atau norma yang dianut oleh sebuah komunitas atau dalam konteks ini adalah negara. Oleh karena itu, oleh antropolog seperti Franz Boas, universalisme dianggap tidak lebihnya sebuah bentuk imperialisme dari nilai – nilai Barat, yakni golongan Eropa yang menganggap peradaban diluar nilai – nilai mereka merupakan peradaban yang primitive dan tradisional (Donnely, 2007). Kritik dan pemikiran Boas tersebut, kemudian melahirkan teori yang kuat dalam

hukum internasional yakni *cultural relativism*, yang menegaskan bahwa nilai – nilai manusia termasuk hak asasi manusia jauh dari yang disebut dengan universal dan justru bersifat sangat relative dengan budaya dan norma yang dianut komunitas tertentu, sebagaimana pernyataan Boas berikut:

*“human values, far from being universal, vary a great deal according to different cultural perspectives. Some would apply this relativism to the promotion, protection, interpretation and application of human rights which could be interpreted differently within different cultural, ethnic and religious traditions. In other words, according to this view, human rights are culturally relative rather than universal (Dau, 2014)*

Hak asasi manusia bersifat relatif jika dikaitkan dengan budaya, sebab budaya merupakan cara pandang suatu komunitas terhadap konsep tertentu. Sama halnya dengan hak asasi manusia, setiap budaya, agama, dan nilai yang dianut oleh setiap komunitas atau negara memiliki perspektif yang berbeda – beda dalam memahami hak asasi manusia, berdasarkan nilai kultural yang mereka anut. Hal ini lah yang kemudian secara perlahan, membuat aliran partikularisme ini menjadi seolah sebuah kritik atau bahkan penolakan terhadap universalisme.

### **Argumentasi Penelitian**

Bantuan luar negeri untuk Korea Utara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan agenda pembangunan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sebuah pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violation*) berupa kelaparan dan malnutrisi di Korea Utara. Kegagalan bantuan luar negeri menyelesaikan masalah pelanggaran manusia ini disebabkan oleh kondisi politik Korea Utara yang isolasionis dan dominasi pemerintah Korea Utara atas bantuan luar negeri yang datang. Hal ini membuat bantuan luar negeri tidak dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, yakni kelaparan di Korea Utara. Sifat partikularistik rezim Korea Utara dengan ideologi *juche* nya, melatarbelakangi sikap dominan dan isolasionis yang pada

akhirnya menimbulkan resistensi terhadap fungsi bantuan luar negeri. Pada akhirnya hal ini mengarah pada kegagalan pembangunan, yang juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kegagalan bantuan luar negeri dengan tidak terselesaikannya masalah pembangunan di Korea Utara seperti kelaparan, yang juga secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk *human rights violations*. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami beberapa aspek dalam kehidupan sosial, yang dalam metodenya tidak menggunakan data sebagai alat analisa melainkan kata – kata ( Patton and Cochran, 2002).

### **Batasan Penelitian**

Penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan pembangunan Korea Utara yang berkaitan dengan pembangunan manusia atau *human development* seperti masalah kelaparan dan kematian karena krisis pangan. Selain itu, jangkauan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara tahun 1990 yakni ketika Korea Utara membuka diri pada bantuan pertama kali, hingga tahun 2017.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data penelitian tidak langsung, yang diperoleh melalui studi literatur atau studi pustaka, sehingga jenis data yang digunakan sebagai penunjang tulisan ini adalah data sekunder yakni berbagai bentuk literatur seperti buku-buku konvensional, *ebook*, kumpulan-kumpulan artikel ilmiah yang memiliki isu terkait bahasan penelitian, jurnal ilmiah. Data-data tersebut diperoleh melalui internet maupun perpustakaan.

## Pembahasan

### Bantuan Luar Negeri untuk Korea Utara

Di era tahun 1990, Korea Utara pertama kali membuka diri untuk melakukan kerjasama dan mau menerima bantuan. Ketika itu, Korea Utara mengalami krisis pangan dan kelaparan atau yang dikenal dengan *Great Famine* karena bencana alam seperti banjir dan kekeringan (Haggard and Noland, 2005). Korea Selatan juga merupakan negara donor utama bagi Korea Utara. Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya ada ikatan saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang menyebabkan Korea Selatan seolah tidak bisa benar – benar mengabaikan setiap permasalahan yang terjadi di Korea Utara. Hal ini dikarenakan alasan kemanusiaan, yakni masih banyak warga Korea Utara yang memiliki ikatan darah dengan warga Korea Selatan.

Merespon arah perubahan kebijakan Lee Myung Bak, Korea Utara kemudian beralih ke China. Kerjasama Korea Utara dengan China lebih berupa hubungan dagang komersil dibandingkan hubungan antara negara donor dengan resipien, sebagaimana Korea Utara dengan Korea Selatan sebelumnya. Hal ini karena China menjadikan Korea Utara sebagai pasar bagi produk nya salah satunya adalah sereal. Korea Utara mengimpor sereal dan komoditas bahan pokok pangan (*grains*) dari China untuk memenuhi suplai makanan di negaranya (Haggard and Noland, 2005).

Bantuan untuk Korea Utara mengalami penurunan pada periode tahun 2002 hingga sekitar tahun 2006. Alasan yang melatarbelakangi negara – negara donor termasuk Amerika Serikat mengurangi bahkan menghentikan bantuan adalah karena sikap Korea Utara yang terus menerus mengembangkan nuklir dan program misilnya. Bantuan Amerika Serikat untuk Korea Utara mengalami penurunan yang sangat drastis, dari total 900.000 ton pada tahun 2001, menjadi hanya sekitar 100.000 ton pada tahun 2006. Bahkan, pada tahun 2007, Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan bantuan pada Korea Utara tidak lain adalah karena isu nuklir (Haggard and Noland, 2005). Tahun 2016 kemarin, Amerika Serikat kembali memberikan bantuan pada Korea Utara melalui UNICEF sebanyak 1 juta US\$.

Bantuan tersebut diberikan tepat sehari sebelum pergantian kepemimpinan Amerika Serikat, dari Presiden Barack Obama kepada Donald Trump (Won, 2017).

Bantuan makanan internasional untuk Korea Utara telah mengalami penurunan dan sebagai dampaknya WFP tidak bisa lagi menyediakan bantuan makanan dan asupan nutrisi untuk kurang lebih 190ribu anak – anak di Korea Utara (Shim, 2017). Dana yang tidak mencukupi, menghambat pengiriman makanan bagi anak – anak sekolah usia dini (*preschool*) tersebut. Menurut WFP, PBB menjanjikan 1,29 miliar US\$ untuk suplai makanan ke Korea Utara, namun hanya 28% dari target PBB yang sudah terpenuhi (Shim, 2017).

Pada bulan Februari, PBB memberikan suplai sebanyak 1.504 ton makanan untuk 680 ribu penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 1.062 ton dari bulan Januari dan sekaligus menunjukkan bahwa secara tidak langsung sebanyak 143 ribu jiwa tercoret dari daftar penerima bantuan. Hal ini karena, semakin sedikitnya bantuan yang masuk, maka akan semakin sedikit pula jumlah penduduk yang dapat menerima bantuan, padahal hampir seluruh penduduk Korea Utara memenuhi kebutuhan pangan mereka berdasarkan distribusi Pemerintah yang tidak lain berasal dari bantuan luar negeri (Shim, 2017)<sup>3</sup>. Hal yang menyebabkan sulitnya penduduk memenuhi kebutuhan pangan mereka bukan hanya terbatasnya sumber makananan yang ada, namun juga terbatasnya akses mereka terhadap sumber yang ada.

### **Hak Asasi Manusia di Korea Utara**

Korea Utara yang merupakan negara paling isolasionis didunia, selama lebih dari beberapa dekade selalu mengalami masalah terkait pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya. Masalah ini muncul sebagai sebuah konsekuensi dari buruknya manajemen kebijakan sektor pertanian, sekaligus kebijakan ekonomi

---

<sup>3</sup> Menurut WFP, sebanyak 18 juta penduduk Korea Utara atau sekitar 70% dari populasinya bergantung pada makanan yang didistribusikan oleh pemerintah

negara yang menganut paham sosialis ini. Kelaparan dan kekurangan pangan (*food crisi*) di Korea Utara terus terjadi bahkan hingga saat ini.

Dalam kasus Korea Utara, masyarakat sudah dihadapkan pada masalah terbatasnya sumber pangan, terbatasnya akses untuk menuju dan memperoleh sumber pangan, sampai pada terbatasnya asupan dan jatah yang seharusnya mereka terima dalam waktu yang sangat lama. Sumber – sumber pangan domestik yang berasal dari sektor pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan krisis pangan yang berujung pada kelaparan dan malnutrisi. Kebijakan – kebijakan yang dibuat dan diimplementasi oleh pemerintah juga tidak berpihak pada terpenuhinya hak rakyat untuk terbebas dari kelaparan. Penduduk wilayah tersebut sangat bergantung pada distribusi makanan oleh PDS, dan karena PDS membatasi distribusi bahkan menghentikan distribusi untuk wilayah tersebut maka kelaparan tidak terelakkan lagi.

Pembagian jatah makanan melalui sistem rasio yang dilakukan PDS yang berdasarkan status politik dan status sosial seperti tersebut diatas, pada akhirnya juga mengarah pada kesenjangan terkait akses makanan dan pemenuhan nutrisi di setiap wilayah di Korea Utara. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada masalah – masalah kesehatan termasuk juga angka harapan hidup di setiap wilayah akan berbeda – beda. Daniel Schwenkendiek dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dari beberapa provinsi yang ada di Korea Utara, Pyongyang merupakan wilayah yang memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini karena mayoritas kalangan elit politik berdomisili di Pyongyang, yang juga merupakan pusat pemerintahan (Schwekendiek, 2010).

### **Bantuan Luar Negeri dan Hak Asasi Manusia di Korea Utara**

Bantuan luar negeri yang diberikan untuk Korea Utara, juga menghadapi masalah lain terkait dengan prinsip – prinsip kemanusiaan yang selama ini dianut oleh rezim bantuan luar negeri secara universal. Bantuan luar negeri, diberikan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Korea Utara yakni kelaparan dan

membantu pemerintah Korea Utara memenuhi persediaan pangan. Namun, ada beberapa prinsip bantuan luar negeri dan humanitarianisme yang sulit untuk diterapkan pada kasus Korea Utara. Setidaknya ada sembilan prinsip kemanusiaan yang berkaitan dengan pemberian bantuan luar negeri oleh donor, yakni:

1. Pihak donor harus mempertahankan kepedulian situasional atas situasi kemanusiaan di negara resipien,
2. Bantuan harus diijinkan untuk menjangkau mereka yang benar – benar membutuhkan,
3. Pihak donor harus memiliki akses terhadap populasi dan wilayah terdampak, mengadakan kegiatan pengawasan (*monitoring*), dan menetapkan kebutuhan,
4. Bantuan hanya akan diberikan bagi wilayah yang dapat diakses,
5. Kepentingan – kepentingan kemanusiaan populasi yang terdampak dilindungi,
6. Pihak donor memberikan dukungan pada kapasitas pembangunan domestik,
7. Pihak resipien boleh berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi upaya bantuan oleh donor,
8. Tenaga manusia yang cukup untuk staf internasional,
9. Kesehatan dan keamanan staf pemberi bantuan kemanusiaan dilindungi sepenuhnya (Smith, 2002)

Prinsip – prinsip yang disebutkan diatas, tidak bisa diterapkan pada pemberian bantuan luar negeri di Korea Utara. Dengan kata lain, apa yang selama ini berlaku di rezim bantuan luar negeri untuk kemanusiaan tidak berlaku untuk Korea Utara. Sebab, negara ini memiliki resistensi sendiri pada dunia internasional, termasuk norma – norma yang dianut. Resistensi tersebut berakar dari ideologi yang hingga saat ini masih dipegang oleh rezim Korea Utara, yakni ideologi *Juche* atau kepercayaan pada diri sendiri (*self – reliance*) (Helgesen and Christensen, 2007) <sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Ideologi *Juche* awalnya digunakan sebagai pelarian atas tekanan yang diberikan oleh China dan Uni Soviet pada akhir tahun 1950 dan awal 1960an. *Juche* mengedepankan kepercayaan pada diri sendiri dan kekuatan sendiri, dalam hal ini nilai yang diajarkan adalah nilai kekeluargaan. Korea

Segala nilai – nilai dan norma yang bukan berasal dari pemimpin atau kepala negara, bukanlah sesuatu yang boleh diikuti oleh rakyat karena dianggap sebagai sebuah gangguan dan pengaruh buruk. Oleh karena itulah, Korea Utara sangat isolasionis terhadap negara luar yang dianggap dapat memberi pengaruh buruk terhadap rezim dan kelangsungan hidup masyarakat Korea Utara.

Ideologi yang mengajarkan untuk hanya percaya pada pemimpin (*juche*), membuat Korea Utara resisten terhadap nilai – nilai hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan dalam bantuan luar negeri. Pada akhirnya, ideologi tersebut melatarbelakangi sikap isolasionisme Korea Utara terhadap pihak donor, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan. Sementara pemerintah Korea Utara mendominasi distribusi dan alokasi bantuan.

### **Dominasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Pemerintah Korea Utara dalam pembagian makanan baik sebelum datangnya bantuan luar negeri maupun setelah datangnya bantuan luar negeri, tidak mengizinkan pihak lain selain badan bentukan pemerintah untuk menangani hal tersebut. Dibentuknya PDS sebagai satu – satunya institusi yang mendistribusikan makanan ke rakyat, merupakan bentuk salah satu dominasi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan. Pembagian PDS yang berdasarkan pada status sosial dan politik, menunjukkan bahwa pemerintah melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya. Hal ini sudah termasuk dalam sebuah pelanggaran hak asasi manusia, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhannya bukan didasarkan pada stratifikasi sosial.

Alasan dibalik gagalnya bantuan luar negeri di Korea Utara dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab gagalnya bantuan luar negeri di Korea Utara dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia adalah,

---

Utara merupakan satu keluarga yang utuh dan pemerintah adalah ayah atau kepala keluarga. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, yang keluarga perlukan adalah mempercayakan semua urusan pada kepala negara, tanpa perlu melihat nilai dan norma lain diluar yang diajarkan di “keluarga” mereka. Ideologi ini juga yang kemudian memperkuat isolasionisme Korea Utara terhadap dunia luar.

karena kapasitas dan kapabilitas pemerintah yang buruk, yang dalam hal ini terlalu mendominasi bantuan luar negeri, sehingga bantuan tidak efektif menyelesaikan masalah. Sikap Pemerintah Korea Utara yang dominan namun koruptif dan tidak transparan, membuat pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara tidak lekas terselesaikan.

Bantuan luar negeri tidak bisa sampai pada yang benar – benar membutuhkan karena dominasi pemerintah dalam hal distribusi. Selain itu, karena hal tersebut rakyat juga tidak memperoleh jatah yang sesuai karena rasio yang diberikan untuk setiap individu berbeda karena didasarkan pada status sosial yang diskriminatif dan jumlahnya tidak memadai untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Jika pelanggaran hak asasi manusia di negara – negara lain menurun seiring datangnya bantuan luar negeri, di Korea Utara justru tidak demikian. Pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi, bahkan setelah bantuan luar negeri datang, dan justru gagal menyelesaikan pelanggaran yang ada tidak peduli seberapa banyak bantuan yang diberikan.

### **Kesimpulan dan Implikasi**

Bahwa bantuan luar negeri gagal dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara karena sikap pemerintah yang dominan terhadap bantuan luar negeri. Dominasi ini berdasarkan ideologi *juche*, yang pada akhirnya memudahkan aksi pemerintah dalam mendominasi proses pengiriman bantuan luar negeri oleh pihak donor sampai tidak mengizinkan pihak donor untuk melakukan evaluasi bantuan yang telah sampai. Selain itu, *juche* yang juga membuat pemerintah menjadi otoritarian, melatarbelakangi sikap pemerintah yang membatasi akses rakyat pada sumber makanan, membatasi porsi dan jatah makanan setiap individu, sampai mengalihkan alokasi bantuan luar negeri untuk kepentingan militer dan elit politik yang ada. Sebab – sebab tersebut, membuat bantuan luar negeri gagal dalam menyelesaikan kelaparan, yang sama artinya dengan gagal menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara.

Implikasi dalam penelitian ini terkait dengan temuan penelitian tentang hak asasi manusia dan bantuan luar negeri untuk Korea Utara adalah, rezim bantuan luar negeri yang didasari oleh nilai – nilai hak asasi manusia dan prinsip – prinsip kemanusiaan yang ada, baik sebagai *reward* ataupun *punishment* tidak dapat diberlakukan untuk negara yang memiliki ideologi sendiri yang jauh berbeda dengan ideologi Barat. Seperti halnya Korea Utara yang memiliki ideologi *juche* yang berarti percaya pada kemampuan diri sendiri (*self – reliance*), sangat anti terhadap nilai – nilai seperti hak asasi manusia yang merupakan nilai yang lahir dari Barat. Kuatnya ideologi yang ada, membuat negara tersebut resisten terhadap nilai – nilai dari luar yang sangat jauh berbeda dengan ideologi mereka. Resistensi ini membuat bantuan luar negeri yang datang, tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya sesuai dengan rezim bantuan luar negeri yang selama ini dianut dunia internasional, sehingga bantuan luar negeri gagal dalam menjalankan fungsinya.

### **Daftar Pustaka**

- Dau, M. D. (2014, August). *The Dichotomy Between Cultural Relativism and Universalism: A Case of Universalism in The Application of International Human Rights Standards in Post Colonial Africa*. Halifax, Nova Scotia, Canada: Dalhaousie University.
- Donnelly, J. (2007). *The Relative Universality of Human Rights*. *Human Rights Quarterly*, Volume 29, Number 2 , 281-306, The Johns Hopkins University Press
- Haggard, Stephan and Marcus Noland. (2005). *The Politics of Famine in North Korea*. Washington D.C: U.S Committee for Human Rights in North Korea.
- Helgesen, Geir and Nis Høystrup Christensen. (2007). *North Korea 2007, Assisting Development and Change*. Nordic Institute of Asian Studies, Norwegian Ministry of Foreign Affair.

- JiYoung, K. (2014). The Politics of Foreign Aid in North Korea. *The Korean Journal of International Studies Volume 12, No. 2* , 425-450. The Korean Association of International Studies
- McLoughlin, C. (2009). *Topic Guide on Fragile States, The Governance and Social Development Resource States ( GSDRS )*. Department of International Development, United Kingdom. Diakses dalam HYPERLINK "<http://www.gsdr.org/docs/open/con67.pdf>"  
<http://www.gsdr.org/docs/open/con67.pdf>
- OHCR. (2017). *Human Rights, A Basic Handbook for UN Staff* . Office of The High Commissioner for Human Rights United Nations Staff College Project.
- Owarinde, Olalekan Bashir and Adegbemi Babatunde Onakoya. (2016). Foreign Aid and Government Expansion: Evidence From Low and Middle Income Countries. *The Journal of Developing Areas, Volume 50, No. 3* , Nigeria
- Patton, Michael Quinn and Michael Cochran. (2002). *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*. London: Research Officer MSF.
- Schwekendiek, D. (2010). Regional Variations in Living Conditions During the North Korean Food Crisis of the 1990s. *Asia-Pacific Journal of Public Health, Institute for Peace and Unification Studies* , Seoul National University, Seoul
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Shim, E. (2017, March 28). *UN Food Aid to North Korea Declined in February 2017*. Retrieved April 7, 2017, from UPI News: <https://www.upi.com/Top-News/World-News/2017/03/28/UN-food-aid-to-north-korea-declined-in-February/5371490713925/>
- Smith, H. (2002). *Overcoming Humanitarian Dilemmas in DPRK ( North Korea )*. United States Institute of Peace.
- Williamson, C. R. (2009). Exploring The Failure of Foreign Aid: The Role of Incentives and Information. *Science+business Media, LLC* . Economic Department, Appalachian State University, Boone, Springer

## **Kegagalan Bantuan Luar Negeri dalam.... (Dini Septyana R)**

Won, B. S. (2017, January 25). *US Humanitarian Aid Goes to North Korea Despite Nuclear Tension*. Retrieved April 26, 2017, from VOA News: [www.voanews.com/a/united-states-humanitarian-aid-goes-to-north-korea/3692811.html](http://www.voanews.com/a/united-states-humanitarian-aid-goes-to-north-korea/3692811.html)